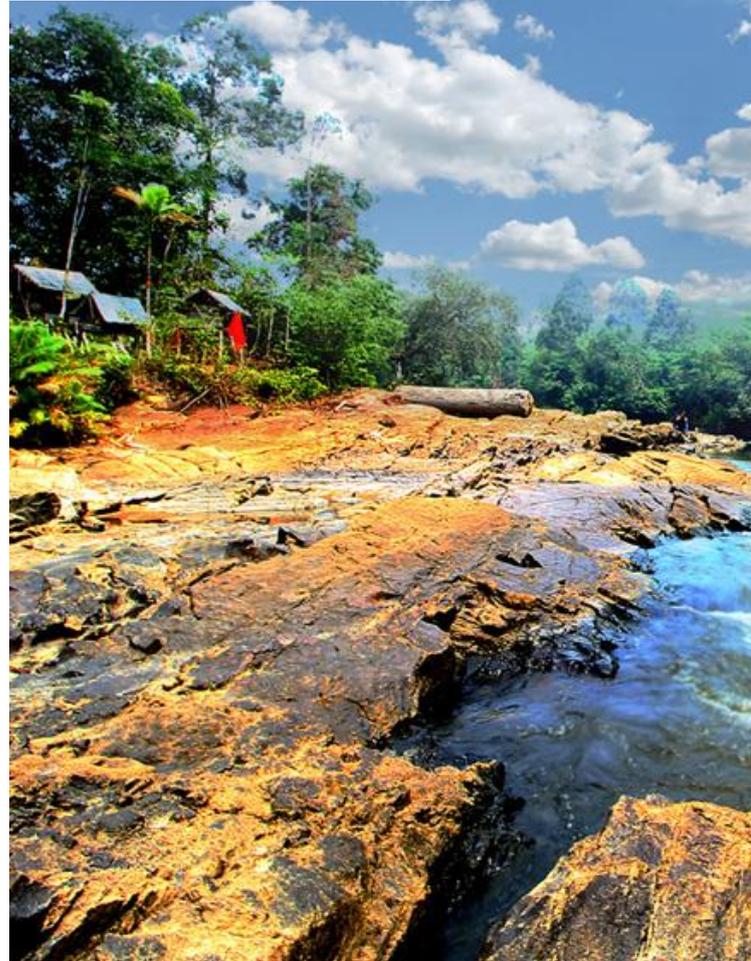




# KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

## RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026





## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS – RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD.

Sehingga dengan tuntasnya Dokumen KLHS - RPJMD ini dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengakomodir isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik bagi Provinsi Kalimantan Tengah guna terwujudnya Kalimantan Tengah Makin **BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis**”

Palangka Raya, Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

### **1. Kondisi Umum**

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur, memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota. Saat ini Kalimantan Tengah memiliki dan mengalir sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter

Tipe ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan mendominasi wilayah Kalimantan Tengah 4.831.448,88 Ha (31,45%), tipe Perbukitan Struktural Kompleks Meratus mencapai luasan 2.854.140,69 Ha (18,58%), tipe Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam mencakup areal seluas 2.630.411,08 Ha (17,12%) dan tipe pegunungan Pegunungan Struktural Kompleks Meratus mencapai areal seluas 2.610.084 Ha (16,99 %).

Kondisi penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 4.254.371,03 Ha (27,69%), belukar rawa 2.078.203,87 Ha (13,53 %), perkebunan seluas 1.923.571,80 Ha (12,52%) serta hutan rawa sekunder seluas 1.699.132,52 ha (11,06%). Belukar rawa didominasi di daerah-daerah selatan, terutama di areal TN Sabangau dan TN Tanjung Puting serta wilayah lainnya dibagian selatan, sedangkan untuk tutupan lahan perkebunan di dominiasi oleh perkebunan kelapa sawit oleh Perusahaan Besar Perkebunan (PBS) serta masyarakat yang membuka lahan untuk tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan analisis spasial deforestasi di Kalimantan Tengah dari data KLHK selama kurun periode 5 tahun, luas total deforestasi mencapai 328.857,20 Ha. Laju deforestasi tertinggi terjadi pada Tahun 2015-2016 mencapai luas 116.085,87 Ha sedangkan pada tahun 2016-2017 mencapai luas 112.868.45 Ha. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan deforestasi yaitu hanya sebesar 6.926,10 Ha.

Dari analisis berdasarkan Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Serutan merupakan Kabupaten yang cukup tinggi luasan deforestasi. Sedangkan Kabupaten/Kota terendah adalah Kota Palangka Raya, Murung Raya, Pulang Pisau dan Sukamara.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017. KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S.Katingan-S.Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki



dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalteng.

Kondisi ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Tengah juga di pengaruhi oleh luasan fungsi ekosistem gambut (FEG) pada masing-masing KHG. Pada 35 KHG di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.684.085 ha terdiri dari indikator fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) 2.125.372 ha (45,37%) dan indikator Fungsi Lindung ekosistem gambut 2.558.712 ha (54,63%) (Tabel II-3). Berdasarkan luasan fungsi ekosistem gambut pada masing-masing KHG (Gambar II-6) menunjukkan luasan yang bervariasi. FBEG terluas terdapat di KHG Sungai Katingan-Sungai Mentaya 231.466 ha (10,89%). Sedangkan pada FLEG terluas terdapat di KHG Sungai Katingan -Sungai Sebangau 601.482 ha (23,51%).

Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa sekunder/bekas tebangan seluas 1.193.158 ha, semak belukar rawa seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha. Berdasarkan Kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagian besar mengalami kerusakan dengan rincian Tidak Rusak seluas 16.957,86 Ha (0,36%), Rusak Ringan seluas 4.316.134,67 Ha (92,39%), Rusak Sedang seluas 286.248,44 Ha (6,13%), Rusak Berat seluas 46.561,86 Ha (1,00%), dan Rusak Sangat Berat seluas 5.781,66 Ha (0,12%). Kerusakan dengan kategori berat hingga sangat berat disebabkan adanya pembangunan kanal-kanal sehingga gambut mengalami kekeringan dan saat musim kemarau rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72,47. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatkan pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan

Secara umum Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kemungkinan terkena bencana alam, baik yang dipicu oleh faktor geografis dan kondisi wilayahnya maupun yang disebabkan oleh ulah manusia. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum dalam 3 (tiga) tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kebakaran hutan dan lahan serta banjir.

## **2. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Berdasarkan data Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kalimantan Tengah jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebanyak 2.669.969 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.385.705 jiwa dan perempuan sebanyak 1.284.268 jiwa.



Berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini dilihat dari besarnya *sex ratio* yaitu sebesar 109,81 pada tahun 2020.

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah tahun 2020 secara umum cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (16,06 persen), Kapuas (15,37 persen), dan Kotawaringin Barat (10,13 persen). Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah persentase kependudukannya sebesar 10.99 persen dengan jumlah penduduk 293.457 jiwa.

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah sebagian besar terpusat di kabupaten induk, yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kotawaringin Barat serta ibukota provinsi yaitu Kota Palangka Raya. Sedangkan sebagian penduduk lainnya tersebar cukup merata di kabupaten lainnya. Banyaknya penduduk yang berpusat di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota tersebut bisa diakibatkan karena kondisi geografisnya, dimana Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang telah lama memiliki pelabuhan besar yang menjadi pusat distribusi barang, Kapuas yang posisi geografisnya paling dekat dengan Kota Banjarmasin yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota provinsi. Sehingga kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang bisa membuat penduduk berkumpul.

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun sebanyak 1.874.200 jiwa atau sebesar 70,2 persen pada tahun 2020. Penduduk usia produktif pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,007 persen dari tahun 2019.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 tercatat TPAK Kalimantan Tengah mencapai 71,3 turun menjadi 68,4 pada tahun 2020. Walau demikian, pada tahun 2018 sempat mengalami peningkatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,4 persen, menurun sebesar 1,28 poin dibanding setahun yang lalu. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 85,84 persen sementara TPAK perempuan hanya 51,60 persen.

Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 sebanyak 1.381.442 jiwa, naik 7015 orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 1.318.133 orang, turun 821 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 63.309 orang, mengalami peningkatan sebanyak 7836 orang dibanding tahun sebelumnya.

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Berdasarkan kondisi tingkat kemiskinan bulan september dari tahun ke tahun, pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Provinsi



Kalimantan Tengah mencapai 6,07 persen secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada periode september tahun 2019 mencapai 4,81 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan tahun 2019, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 7,19 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27,38 ribu jiwa.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,13 dan seiring berjalannya waktu IPM terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 71,05. Nilai IPM 71,05 berarti masuk kategori Tinggi. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya.

### **3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki kebutuhan air yang belum melampaui ketersediaan air di wilayah tersebut (area berwarna hijau). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki area dengan ketersediaan air yang telah terlampaui. Adapun beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang ketersediaan airnya terlampaui yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan persentase luas area berturut-turut seluas 0,1%, 0,19%, 0,02%, 8,29%, 0,92%, 0,11%, 0,70%, 0,06%, 5,65% dan 0,03% dari luas masing-masing kabupaten. Berdasarkan tutupan lahan yang digunakan dalam analisis, tutupan lahan di lokasi yang telah melampaui ketersediaan air, sebagian besar merupakan perkebunan sawit. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Taufiq et al (2013), bahwa perkebunan sawit dapat mengurangi kemampuan lahan dalam menyediakan air hingga mencapai 30% - 40%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air, dengan potensi kelebihan ketersediaan air mencapai 162.451.139.206 m<sup>3</sup>/tahun. Selisih yang paling besar berada di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan sebesar 34.750.391.047 m<sup>3</sup>/tahun dan 23.058.921.956 m<sup>3</sup>/tahun.

Secara keseluruhan kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah belum melampaui ketersediaannya (warna hijau). Namun demikian, terdapat area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaannya. Kabupaten/ kota dengan persentase luas wilayah yang telah melampaui ketersediaan pangan cukup besar adalah Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya, Adapun persentase luas per- kabupaten/ kota tersebut secara berturut – turut mencapai 58,11% dan 57,80% dari luas masing – masing kabupaten/ kota. Jika diamati penggunaan lahannya, area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaan pangan cenderung terletak di area permukiman yang padat penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan



pangan akan semakin besar, sehingga cenderung memiliki kebutuhan pangan yang melampaui ketersediaan pangannya.

Tingkat pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah harus diimbangi dengan meningkatnya jumlah ketersediaan pangan bagi para penduduknya. Lebih luas, Thomas Robert Malthus sejak tahun 1798 telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan penyediaan pangan yang memadai bagi penduduknya. Malthus dalam teorinya mengungkapkan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan. Hasil analisis status ketersediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di beberapa kabupaten/ kota masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya masing – masing, dengan total kelebihan ketersediaan kalori total mencapai 1,512,436,983,073 Kkal/tahun (Tabel 5.5). Namun demikian, ketersediaan pangan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Timur telah melampaui ketersediaan pangannya, dengan kekurangan kalori per tahun mencapai -161.500.453.263 Kkal/tahun, -33.366.089.608 Kkal/tahun, -22.715.824.546 Kkal/tahun dan -13.878.966.087 Kkal/tahun. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Palangka Raya mengalami defisit kalori per tahun terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), merupakan yang paling besar di Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai 115 per km<sup>2</sup>.

Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah secara umum dapat dikatakan baik/tercukupi sampai dengan Tahun 2030, Daya dukung permukiman terendah ada di Kabupaten Seruyan dengan nilai DDT 2,76. Sebaliknya nilai tertinggi ada pada Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai DDDT 10,77.

#### **4. Resiko Dampak Lingkungan**

Wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki resiko banjir mencapai luasan 9.594,217 Ha yang terbagi menjadi resiko tinggi seluas 748.368 Ha, sedang seluas 4.192.918 Ha dan resiko rendah seluas 4.652.931 Ha. Areal yang memiliki resiko banjir tertinggi sebagian besar di wilayah selatan yaitu di Kabupaten Seruyan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan dan Kapuas serta Barito Selatan

Di Kalimantan Tengah kekeringan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi pada musim kemarau. Kekeringan yang terjadi menyebabkan gagal panen serta mengganggu transportasi kapal melalui Sungai. Cakupan resiko kekeringan dengan tingkat sedang di Provinsi Kalimantan Tengah sangat luas mencapai 74% ( 11.316.002,02 Ha) tersebar merata diseluruh wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan resiko kekeringan dengan kategori tinggi mencapai 11% (1.748.649,54 Ha). Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan



kabupaten dengan resiko kekeringan terluas, disusul Kabupaten Seruyan dengan tutupan lahan umumnya berupa perkebunan kelapa sawit. Potensi kekeringan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau umumnya didominasi pada tutupan lahan persawahan, sehingga sangat berpotensi menyebabkan kegagalan panen.

Bencana tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah yang sering terjadi adalah longsor di beberapa ruas jalan yang memiliki kontur perbukitan di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas bagian utara, Murung Raya dan Muara Teweh. Longsor juga sering terjadi di lokasi-lokasi penambangan rakyat di Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas dan Kotawaringin Barat. Bencana tanah longsor di ruas jalan mengakibatkan akses jalan terputus dan beban pembiayaan untuk perbaikan ruas jalan yang rusak, sedangkan longsor di areal-areal penambangan rakyat sering memakan korban jiwa para penambang. Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tercatat pada Tahun 2018 tercatat sebanyak 57 kali terjadi bencana longsor di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.

Beberapa wilayah Kalimantan Tengah yang berada di pinggir laut jawa berpotensi terkena dampak dari gelombang tinggi dan abrasi. Berdasarkan data dari BNPB seluas 1.689.719,7 Ha (15%) memiliki resiko tinggi terjadinya gelombang tinggi dan abrasi. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas berpotensi terkena gelombang dan abrasi dengan resiko tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 terjadi 19 kasus gelombang pasang laut dan abrasi.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah hampir selalu terjadi setiap tahun terutama di lahan gambut, daerah semak belukar. Seluas 4.914.754,28 Ha (38%) wilayah Kalimantan Tengah memiliki resiko tinggi dan seluas 2.127.553,36 Ha (16%) memiliki resiko sedang terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan. Resiko tinggi sebagian besar di wilayah selatan Kalimantan Tengah terutama pada lahan. Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Seruyan dan Kapuas merupakan kabupaten dengan resiko tinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan.

## **5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia Tahun 2019, luas lahan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.778.702 Ha, atau 10,86 % dari total tutupan kelapa sawit Nasional.

Berdasarkan data terdapat 259 Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi maupun yang baru mendapat izin lokasi. Saat ini masih terdapat permasalahan di sektor perkebunan, yaitu mengenai status kawasan. Masih banyak perusahaan beroperasi di kawasan Hutan dan belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan. Hal ini disebabkan dasar perizinan yang diterbitkan pada waktu itu mengacu pada RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003. RTRWP ini



dikemudian hari dibatalkan oleh Kementerian Kehutanan dan untuk status kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.168.656 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  689.666 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. SK ini kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2017.

Sampai dengan tahun 2019, luas total pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh KLHK di wilayah Kalimantan Tengah seluas 1.214.747,33 Ha. Terkait hal tersebut di atas, maka saat ini masih banyak kegiatan perkebunan berada di Kawasan Hutan Produksi, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Seiring dengan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, maka industri pengolahan atau PKS di Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang mengolah tandan buah segar menjadi Crude Palm Oil (CPO) pada umumnya paralel dengan tumbuhnya perkebunan besar swasta.

Hingga tahun 2019, telah terbangun 104 pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang tersebar di 10 kabupaten di Kalimantan Tengah. Total kapasitas terpasang dari seluruh pabrik pengolahan CPO tersebut adalah 6.488 ton TBS per jam. Disamping itu telah beroperasi 2 unit pengolahan CPO (Minyak goreng/CPO refinery) yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur dengan kapasitas terpasang 3.000 ton CPO per jam.

Selain sektor perkebunan, kegiatan lain yang memberikan tekanan terhadap perubahan tata guna lahan adalah kegiatan pertambangan. Berdasarkan data dari <https://modi.minerba.esdm.go.id/>, Total luas IUP untuk seluruh perusahaan di atas, adalah 2.637.391,98 Ha. Lokasi kegiatan umumnya berada di bagian utara wilayah Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung kegiatan pertambangan ini sebagian besar membangun jalan koridor untuk pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus) yang sebagian besar berada di pinggir Sungai Barito. Keberadaan jalan ini menyebabkan penguasaan lahan oleh masyarakat di kiri dan kanan jalan semakin tidak terkendali.

Tekanan lain terhadap perubahan tata guna lahan adalah kegiatan di sektor Kehutanan terutama IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI. Berdasarkan data dari



KLHK Tahun 2019 jumlah IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 56 perusahaan aktif dengan total luas areal yang diberikan seluas 3.976.219,67 Ha, IUPHHK-HTI sebanyak 32 perusahaan dengan luasan total 865.035,00 Ha dan IUPPHK-RE sebanyak 3 perusahaan dengan total 164.926,00 Ha. Khusus untuk kegiatan IUPHHK-RE berdampak positif terhadap kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, karena sifatnya non eksploitasi. Sebagian besar kegiatan IUPHHK-HA berada di bagian utara wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar kegiatan disektor kehutanan tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan.

## 6. Kondisi Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19. Adapun rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 ialah sebesar 8% dengan kontribusi rata-rata pertumbuhan yang paling besar dari Hasil Retribusi Daerah yaitu sebesar 46%. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan juga sama halnya dengan realisasi pendapatan daerah. Dimana cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 14% pada tahun 2016-2020, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 38% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 56%.

Pertumbuhan Bagi Hasil Bukan Pajak yang paling signifikan pada tahun 2018 yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp 191.446.336.575 dari tahun 2017, komponen yang mengalami peningkatan tersebut diantaranya Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Eksploitasi (royalti). Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar 56% atau sebesar Rp 1.078425.745.186 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 241.247.658.125 hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastruktur daerah. Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Namun Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2016-2020 rata-rata juga mengalami penurunan yang terkontraksi sebesar -46%. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020, yaitu adanya penurunan pada dana insentif dikarenakan terjadinya dampak realokasi covid 19.

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 62%. Hal ini dengan proporsi PAD sebesar 34% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4% dari seluruh total pendapatan. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 1.175.950.774.885 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Pada Tahun 2017 sebesar Rp



1.976.534.909.613 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.203.518.578.230 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Tahun 2019 sebesar Rp 2.369.472.398.583 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.981.257.268.055 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi.

Pada periode 2016-2020, realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 20%. Penurunan tersebut paling banyak disumbang pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2016 terjadi pembiayaan netto minus sebesar Rp 62.160.363.916 hal tersebut dikarenakan nilai Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan yang cukup besar diantaranya penyertaan modal sebesar Rp 40.009.989.866 serta adanya pembayaran pokok utang sebesar Rp 61.500.000.000.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 196%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 196%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2018 diantaranya terjadi pelampauan pendapatan sebesar Rp 263.840.528.340, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp 382.949.474.702, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp 46.912.674.052 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah pagu sebesar Rp 5.000.000.000.

Aset pada periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset tersebut diantaranya Komponen Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset lancar diantaranya disebabkan rata-rata pertumbuhan posisi kas daerah sebesar 13%, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan pada SiLPA tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp 568.244.751.927 serta pada tahun 2019 sebesar Rp 690.274.149.360. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan SiLPA yakni sebesar Rp 610.945.412.699. Komponen Piutang pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan pada komponen Piutang Lain-Lain PAD yang sah serta Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pada piutang lainnya terjadi rata-rata pertumbuhannya sebesar 99% hal tersebut dikarenakan pada periode tahun 2017 terdapat koreksi nilai piutang lainnya sebesar Rp 236.976.401.453. Aset tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3%. Terdapat beberapa komponen aset yang mengalami penurunan dalam hal ini yang diantaranya tanah serta jalan, irigasi dan jaringan. Tanah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1%, penurunan tersebut pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 terjadi pengurangan diantaranya Hibah Keluar sebesar Rp 428.874.000, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp 407.252.800, Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan



Kebijakan/Status Ditahun Berjalan sebesar Rp 184.906.400.000, dan Pengalihan Status Penggunaan sebesar Rp 400.000.000.

Jalan, irigasi dan jaringan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2%, hal tersebut dikarenakan tahun 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp 2.207.468.906.053 dengan rincian Hibah sebesar Rp 2.200.708.463. Reklas antar rekening pada aset tetap sebesar Rp443.150.740.971 Reklas dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp5.651.436.737 Reklas ke Beban sebesar Rp 96.684.000 koreksi/penyesuaian sebesar Rp1.616.163.519.380 Reklas ke BM Tidak Menambah Aset Rp 358.052.950 dan Reklas ke Persediaan sebesar Rp 139.847.763.552. Kewajiban pada periode Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada utang beban sebesar Rp 317.760.447.726 serta utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 67.702.314. Ekuitas dana pada periode tahunan 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%, Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.715.920.803.773.

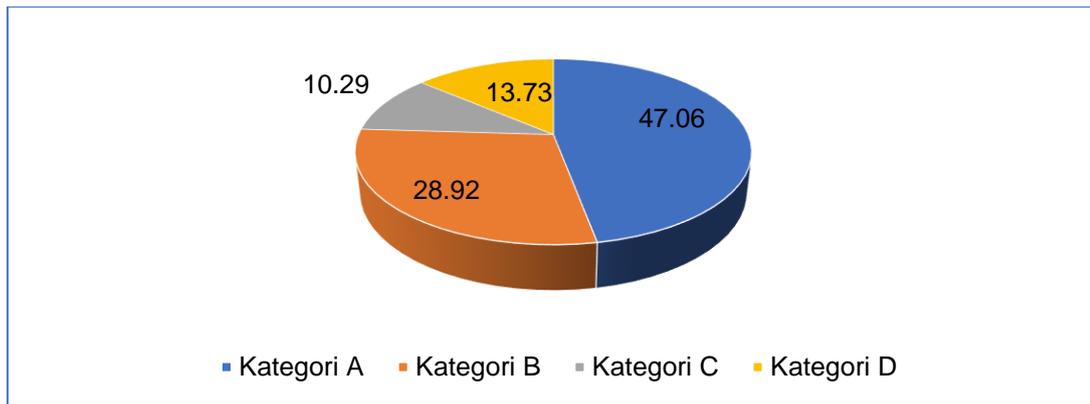
## 7. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dari 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi, ada 204 indikator yang ada di wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah, dan 31 indikator tidak ada di wilayah kajian antara lain, panjang pembangunan jalan tol, panjang pembangunan jalur kereta api, jumlah kawasan metropolitan dan lain-lain.

Dari total 204 indikator TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 95 Indikator (46,57%) sudah dilaksanakan dan telah mencapai target yang ditetapkan, 60 Indikator (29,41%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 Indikator (10,29%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan sebanyak 8 indikator (13,73%) tidak ada data. Rincian pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Pencapaian (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	96	47,06
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	59	28,92
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	21	10,29
4	Data tidak tersedia	28	13,73
Total indikator yang menjadi urusan dan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah		204	100,00



**Gambar 1 Persentase Capaian TPB terhadap Target Nasional**

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 17 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 95 (sembilan puluh lima) indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tersebut harus dipertahankan agar capaiannya tetap baik bahkan bisa lebih meningkat lagi.

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetapi belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 16 (enam belas) tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional akan menjadi isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Jumlah tujuan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 10 (sepuluh) tujuan dengan indikator sebanyak 21 (dua puluh satu). Indikator dengan kategori C ini harus dilaksanakan indikatornya dengan implemetasinya pada program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap OPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 21 (dua puluh satu) indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target RPJMD). Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target terbanyak adalah pada indikator “Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan”.

Terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator TPB yang belum memiliki data dari 10 (sepuluh) tujuan. Indikator dengan kategori D tersebut merupakan tanggung jawab OPD pada Provinsi Kalimantan Tengah. Ketersediaan data merupakan hal penting yang seharusnya dipenuhi OPD agar dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan akan sesuai dengan kondisi wilayah, tepat guna dan tepat sasaran.



## 8. Isu Strategis, Pemasalahan dan Sasaran Strategis

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai baseline yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan, isu strategis dan prioritas diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut, sedangkan untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya kedepan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan analisis capaian TPB Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 204 indikator TPB yang relevan, menunjukkan bahwa sebanyak 45,59% Indikator TPB telah mencapai target nasional, 30,39% indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 10,29% indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan sebanyak 13,73% tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedia data.



**Tabel 2. Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum tercapainya target nasional menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat		
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum terwujudnya jaminan bagi semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%		
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%		
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Masih meningkatnya jumlah korban meninggal akibat terkena dampak bencana		
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Belum dilaksanakan		
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak ada data		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Tidak ada data		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		(SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)			
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan		
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan		
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum meratanya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Belum mencapai target nasional Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat setiap tahun mengalami penurunan	Belum tercapainya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum mencapai target nasional proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari menurun hingga mencapai 85,%		
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum hilangnya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk belum tercapainya target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Belum mencapai target nasional menurun menjadi 28%		
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan	Belum mencapai target nasional meningkat skor ppH mencapai 92,5		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		(PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	dan tingkat konsumsi ikan mencapai 54,5 kg/kapita/tahun		
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Belum mencapai target nasional peningkatan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 %	Masih terjadinya angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Belum mencapai target nasional meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95%	Masih terjadinya kasus kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Belum mencapai target nasional Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245	Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum dilaksanakan	Masih terjadinya sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Belum mencapai target nasional prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4%		
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Belum dilaksanakan		
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280		
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tidak ada data	Belum optimalnya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak ada data		
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91%	Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Belum mencapai target Nasional meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95%		
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak ada data	Masih tingginya jumlah jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum mencapai target nasional Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun menurun setiap tahun	Belum maksimalnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Belum mencapai target nasional persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6%	Belum optimalnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).			
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih terjadinya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Belum mencapai target nasional median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun		
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Belum mencapai target nasional menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun		
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi,	Belum dilaksanakan	Masih rendahnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International</i>	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International</i>



<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Nomor Indikator</b>	<b>Indikator TPB</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran Prioritas</b>
		dan layanan kesehatan reproduksi.		<i>Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	<i>Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%		
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Belum mencapai target nasional meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85%		



**Tabel 3 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019	Belum terwujudnya jaminan akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019		
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Belum mencapai target nasional pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja setiap tahun meningkat	Belum terwujudnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Belum mencapai target nasional Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019		
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan		
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum terwujudnya pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Belum mencapai target nasional meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Belum tercapainya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Tidak ada data		
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum dilaksanakan		
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak ada data	Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak ada data		
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum mencapai target nasional meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.		
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019	Belum terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Belum mencapai target nasional Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019		
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Belum mencapai target nasional meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak ada data	Masih rendahnya akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau,	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau,



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
				dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tidak ada data		
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak ada data		
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Belum mencapai target nasional meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Belum optimalnya kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum optimalnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Tidak ada data	Belum terwujudnya dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.



**Tabel 4 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Belum dilaksanakan		
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%		
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Belum mencapai target nasional akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%		
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Belum mencapai target nasional peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Belum tercapainya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Belum dilaksanakan	Belum terlaksananya efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
					mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Tidak ada data	Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Tidak ada data		
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Belum dilaksanakan		
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Tidak ada data	Belum terwujudnya perlindungan dan restorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Tidak ada data		
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih Tingginya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Belum dilaksanakan		
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan		
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Belum mencapai target nasional cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019	Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
				khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019	Belum optimalnya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Tidak ada data	Belum optimalnya pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019	Belum terwujudnya pelarangan subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.
Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	belum mencapai target nasional meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Belum tercapainya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Belum mencapai target nasional Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 ha	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya penghentian penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.



<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Nomor Indikator</b>	<b>Indikator TPB</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran Prioritas</b>
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data	Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.



**Tabel 5. Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak ada data		
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Belum dilaksanakan		
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak ada data		
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada data	Masih terjadinya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada data		
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019		
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak ada data	Belum terwujudnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019		
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum mencapai target nasional meningkatnya indeks RB menjadi Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%		
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum mencapai target nasional keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) meningkat	Belum terwujudnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.



Permasalahan utama lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tiga komponen utama lingkungan hidup yakni tanah, air, dan udara. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, maka dihasilkan enam kelompok komponen lingkungan yang perlu dibahas secara seksama, yakni: (i) lahan dan hutan; (ii) air; (iii) udara; (iv) pesisir dan lautan; (v) kebencanaan dan perubahan iklim, dan (vi) pangan.

Isu strategis terkait isu lingkungan hidup di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan gambut untuk kegiatan PSN *food estate* seluas  $\pm$  165.000 Ha.
- b. Kebakaran hutan dan lahan.
- c. Konflik *tenurial* antara perusahaan perkebunan/pertambangan dengan masyarakat.
- d. Alih fungsi lahan untuk proyek PSN (tanaman singkong) oleh Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS), kementerian Pertahanan seluas  $\pm$  30.000 Ha dan direncanakan akan dikembangkan hingga mencapai hingga mencapai  $\pm$  400.000 Ha.
- e. Masih tingginya laju *deforestasi* dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit.
  - a. Penurunan indeks kualitas air (IKA) sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - b. Fluktuasi debit air sungai saat musim hujan dan kemarau sangat tinggi
  - c. terjadinya penurunan kualitas udara saat terjadi kebakaran hutan yang berdampak pada peningkatan konsentrasi PM 10 dan PM2.5, dan menyebabkan emisi carbon sehingga berdampak terhadap perubahan iklim.
  - d. terjadinya abrasi di pantai yang mengancam pemukiman dan sarana vital masyarakat.
  - e. Kejadian banjir di beberapa wilayah dan terjadinya longsor.

## 9. Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan proyeksi capaian TPB sebanyak 33 indikator TPB perlu dilakukan upaya tambahan agar dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, Indikator tersebut adalah :

- 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
- 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.
- 1.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- 2.2.1\* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
- 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.
- 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
- 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
- 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 3.a.1\* Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq$ 15 tahun.



- 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.
- 4.a.1\* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
- 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
- 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
- 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
- 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
- 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.
- 8.1.1\* Laju pertumbuhan PDB per kapita.
- 8.3.1\* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
- 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
- 8.6.1\* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.
- 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.
- 9.2.1\* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
- 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
- 11.5.1\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- 13.1.2\* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.
- 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
- 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
- 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
- 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk tetap harus dilaksanakan dengan melakukan target capaian minimal. Sebanyak 29 indikator TPB dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perpres tanpa upaya tambahan.



Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target walaupun sudah direncanakan didalam RPJMD sebelumnya, namun dikarenakan keterbatasan anggaran/dana sehingga tidak dapat dilaksanakan maka direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa rekomendasi sesuai dengan kondisi DDDTLH dan Jasa Lingkungan serta resiko bencana.

Untuk indikator TPB yang tidak ada data maka direkomendasikan di tahun 2021-2026 dapat dilengkapi data-datanya melalui koordinasi dengan berbagai sektor.



**Tabel 6 Ringkasan Eksekutif**

<b>TUJUAN</b>		: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	: 1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	44.075	29,666.67	26,000.00	-0.16	6.552
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih Tingginya jumlah keluarga sangat miskin di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
a. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan b. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	82.16	95.24	94.19	0.03	109
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	64.79	78.67	76.00	0.07	135
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	77.58	86.25	85.00	0.04	116
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	39.00	80.04	75.15	0.15	176
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
a. Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. b. Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan c. Belum tercapainya target nasional meningkatkannya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%							



d. Belum tercapainya target nasional meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%	
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
a. Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. b. Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% d. Meningkatkan akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%	
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>
APBD dan APBN serta CSR Perusahaan	



<b>TUJUAN</b>		: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84.30	38.33	30.00	-0.49	0
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	36.95	37.43	37.30	0.01	39
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih meningkatnya jumlah korban meninggal akibat terkena dampak bencana b. Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana b. Infrastruktur pencegahan dan pengendalian bencana c. Pengurangan resiko bencana d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan pokok						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	9.41	5.16	4.78		-0.13	2
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	11.80	10.50	10.20		-0.05	7
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	a. Masih Tingginya Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat b. Masih banyaknya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian b. Harga bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat c. Tercapainya pemerataan distribusi bahan pangan							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7.95	6.25	6.00	-0.10	3
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	7.95	6.25	6.00	-0.10	3
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	54.9	37.50	35.00	-0.16	8
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	83.2	89.50	88.60	0.03	110
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih tingginya angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita b. Masih tingginya angka Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe c. Masih tingginya angka prevalensi anemia pada ibu hamil d. Masih rendahnya skor pPH dan tingkat konsumsi ikan kg/kapita/tahun						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						



- a. Tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, merata dan berkualitas terutama pada kelompok rentan masalah gizi (ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita)
- b. Terjaminnya penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi
- c. Tercapainya sistem pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara merata
- d. Tercapainya perbaikan status gizi pada kelompok rentan masalah gizi
- e. Peningkatan sadar pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil serta peningkatan gizi pada ibu hamil
- f. Peningkatan diversifikasi pangan
- g. Meningkatnya Konsumsi Ikan

5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>
---	----------------------------

APBD dan APBN
---------------



<b>TUJUAN</b>		:	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	77.694.208	81,099,778.33	80,694,208.00	-	0.01	90,332,884
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
Belum meningkatnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian								
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
Optimalisasi pertanian pada areal jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan potensi bencana kekeringan								
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
APBD dan APBN								



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	90.42	93.67	93.00	-	0.01	105
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
Masih rendahnya Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih								
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
a. Meningkatkan kesadaran kesehatan Ibu dan anak melali otimpalisasi Posyandu, dan Polindes b. Peningkatan penyebaran Bidan Desa								
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
APBD								



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000..				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	79	91.23	89.96	0.03	113
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Meningkatkan kesadaran kesehatan Ibu dan anak melalui otimpalisasi Posyandu, dan Polindes b. Peningkatan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap pada bayi						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58	48.44	47.57		-0.04	37
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Masih Tingginya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat pola hidup bersih dan sehat b. Optimalisasi Penanganan kasus Tuberkulosis							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan..				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	16.4	8.82	8.16	-0.14	3
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	11	41.67	35.00	0.33	245
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih tingginya angka Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun b. Masih rendahnya Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Menurunkan angka Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun melalui peningkatan kesadaran pola hidup sehat b. Meningkatkan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada.						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	71.4	84.50	82.00	0.06	142
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	Meningkatnya perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat..				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	71.4	84.50	82.00	0.06	142
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih Tingginya Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
Mengurangi atau menurunkan presentase perokok pada anak usia ≥ 15 Tahun							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	75	82.00	81.00		0.03	105
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Kurang optimalnya kualitas manajemen Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	Meningkatkan Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	45.00	66.00	63.00	0.12	161
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Rendahnya proporsi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai (listrik, internet, komputer, sarana penyandang disabilitas, air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang belum memiliki akses listrik, internet, komputer, penyandang disabilitas, air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.13	0.02	0.02	-0.29	0
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih adanya perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
Mengurangi kasus perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD							



<b>TUJUAN</b>		: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	20.16	18.01	17.81	-0.03	15
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20.80	21.00	21.00	0.00	21
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	8.30	7.58	7.53	-0.02	7
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih adanya perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
Mengurangi kasus perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD							



<b>TUJUAN</b>		: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	5.3	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	10.88	31.82	27.58	0.26	100
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Meningkatkan kualitas SDM Perempuan b. Penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD						



<b>TUJUAN</b>		: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	12.00	10.25	10.00	-0.06	6
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	77.10	84.00	83.00	0.03	100
3.	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih tingginya persentase Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). b. Masih rendahnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern						
4.	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi b. Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga c. Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi ber kualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah d. Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi						
5.	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	82.16	95.24	94.19		0.03	109
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	49.81	75.17	70.00		0.18	100
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	a. Pemukiman penduduk yang menyebar b. Kualitas air sungai semakin menurun							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum b. Mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan cemaran air permukaan							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	64.79	78.67	76.00	0.07	100
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	Meningkatkan sanitasi layak bagi rumah tangga						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	56.80	59.65	59.60		0.0021	58
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	Meningkatkan kualitas air sungai sebagai sumber air baku							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	85.72	92.83	91.53		0.02	109
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	1,153.52	1,184.00	1,175.00		0.01	1,295
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	a. Masih rendahnya rasio Rasio elektrifikasi b. Masih rendahnya Konsumsi listrik per kapita.							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Meningkatkan akses listrik di Desa-Desa terpencil b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga konsumsi listrik akan meningkat							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



TUJUAN		: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6.15	8.25	8.00		0.08	14
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Masih redahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif; b. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor; c. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



TUJUAN		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	4.79	7.50	7.00		0.19	32
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Masih redahnya Laju pertumbuhan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif; b. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor; c. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	40.25	46.00	45.00	0.06	73
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	50.04	51.75	51.50	0.01	57
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	66.84	68.25	68.00	0.01	74
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih Rendahnya Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin b. Masih Rendahnya Persentase Tenaga Kerja Formal c. Masih rendahnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kewirausahaan serta Kualitas Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif; e. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor; f. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja.						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



TUJUAN		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	21.91	22.58	22.40	0.01	26
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Belum tercapainya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif; b. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor; c. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1.00	3.17	3.00	0.07	2
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	19.00	20.50	20.00	0.04	24
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih kurangnya jumlah dermaga penyeberangan b. Masih kurangnya jumlah pelabuhan strategis						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal; b. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri Daerah untuk mendukung Sistem Logistik Daerah dan penguatan konektivitas Daerah ; c. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi Daerah dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; d. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi; e. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; f. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	14.97	15.50	15.40	0.02	18
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4.26	5.75	5.50	0.12	14
3.	<b>PERMASALAHAN</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri</li> <li>b. Belum Optimalnya nilai tambah sektor industri manufaktur Terhadap PDB Per Kapita</li> <li>c. Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri</li> <li>d. Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur lebih rendah dari laju pertumbuhan PDB</li> </ul>						
4.	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk peningkatan daya saing sektor industri</li> <li>b. Menumbuhkan industri baru yang bertumpu pada sumber daya lokal</li> <li>c. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri pengolahan</li> <li>d. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri</li> <li>e. Peningkatan produk bahan baku / penolong domestik sebagai bahan baku pengganti / substitusi impor</li> </ul>						
5.	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84.30	67.50	65.00	-0.09	30
3.	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih tingginya korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
4.	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana b. Infrastruktur pencegahan dan pengendalian bencana c. Pengurangan resiko bencana						
5.	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	71.30	77.83	77.00	0.03	98
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Persentase sampah perkotaan yang tertangani						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Pembangunan sarana pengelolaan persampahan b. Peningkatan daur ulang sampah						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	4.966,76	6.050	5.900	0.06	9.856
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan jumlah usaha pengumpulan limbah B3 skala provinsi b. Peningkatan kepatuhan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84.30	67.50	65.00	-0.09	30
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih tingginya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana b. Infrastruktur pencegahan dan pengendalian bencana c. Pengurangan resiko bencana						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



<b>TUJUAN</b>		: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	85.00	87.50	87.00		0.01	99
3.	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Masih rendahnya persentase kepatuhan dalam memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan							
4.	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	Meningkatkan pengawasan pelaku usaha dan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan							
5.	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD dan APBN							



TUJUAN		Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	47.19	54.00	53.00	0.05	79
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Pengelolaan kawasan hutan telah berkontribusi terhadap PNBK, tetapi belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah provinsi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan b. Konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan, kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta ketimpangan pemanfaatan sumberdaya hutan antara perusahaan dan masyarakat c. Kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis dan areal non produktif serta perambahan Kawasan hutan						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	a. Percepatan pembentukan TAHURA Provinsi dan mendorong penetapan Kawasan Ekosistem Esensial b. Rehabilitasi lahan bersama masyarakat melalui Pembangunan Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan dan Rehabilitasi Mangrove						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD dan APBN						



TUJUAN		Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	100.00	135.00	130.00	0.10	280
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih rendahnya Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
a. Optimalisasi kewajiban rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPHK. b. Percepatan rehabilitasi lahan kritis							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD dan APBN							



<b>TUJUAN</b>		: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3.70	3.97	3.99	0.01	4
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
Masih rendahnya capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
a. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik b. Penerapan e-government dan peningkatan pengawasan c. Optimalisasi e-procurment							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
APBD							



TUJUAN		Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	63.05	68.45	67.92	0.02	77
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	57.68	60.18	59.94	0.01	64
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	59.59	66.25	65.00	0.05	100
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	a. Masih rendahnya Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) b. Masih rendahnya Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan c. Rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	d. Meningkatkan ASN dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan e. Meningkatkan penggunaan E-procurement untuk proses pengadaan barang dan jasa f. Melakukan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD						



<b>TUJUAN</b>		: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
2.	<b>INDIKATOR</b>	Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10.88	11.80	11.70	0.03	16
3	<b>PERMASALAHAN</b>						
	Masih rendahnya Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
	Meningkatkan kapasitas perempuan dalam segala bidang						
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						
	APBD						



<b>TUJUAN</b>		: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
1.	<b>ISU STRATEGIS</b>	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
2.	<b>INDIKATOR</b>		Baseline	Rata-Rata			r (%)	Tahun 2030
				Mean	Median	Modus		
	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1.51	1.97	1.80		0.12	5
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	Masih rendahnya pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	Meningkatkan potensi PAD dari berbagai sektor Meningkatkan inventasi daerah							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							
	APBD							